

Bupati Bogor Kunjungi Bocah yang Disetrika Ayah Tiri

BOJONGGEDE (IM)- Bupati Bogor, Ade Yasin meminta masyarakat untuk melupakan kepada yang berwajib apabila melihat tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dia menegaskan tindak kekerasan bagaimana pun bentuknya menjadi urusan atau tanggung jawab bersama.

Hal itu dikatakan Ade Yasin saat mengunjungi rumah bocah PR (8) yang diikat dan disetrika ayah tirinya di Kampung Babakan, Desa Ragajaya, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Minggu (10/4).

"Dalam berumah tangga ada yang berantem dengan kekerasan atau KDRT baik bapak ke anak, bapak ke istri atau bagaimana pun itu bukan urusan rumah tangga lagi tapi urusan kita semua. Kalau kita menemukan itu urusan kita semua," kata Ade Yasin.

Menurutnya masyarakat tidak perlu khawatir atau takut melapor jika mengalami atau pun melihat tindakan tersebut. Karena, pelaku kekerasan bisa dijerat saksi pidana. "Laporkan kalau melihat kekerasan rumah tangga jangan dididemin, ada

sanksi pidananya," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Ade Yasin sempat berbincang-bincang dengan ibu kandung dari bocah tersebut. Dia mengatakan keinginannya untuk pindah rumah dan akan difasilitasi Pemerintah Kabupaten Bogor.

"Tadi ibunya menyatakan ingin pindah dari sini, saya akan upayakan untuk pindah, kita fasilitasi untuk ngontrak yang baru karena di sini trauma. Tapi tidak secepat itu juga karena masih dalam penyelidikan polisi. Kalau sudah penyelidikan, dibolehkan pindah kita akan urus kepindahannya," ucapnya.

Kemudian, ibu kandung mengatakan kondisi PR sudah berangsur membaik saat ini. Pemerintah Kabupaten Bogor bersama unsur terkait lainnya berjanji akan terus mengawal kasus ini.

"Sekarang sudah baik ya, bahkan sudah tenang karena didampingi oleh Dinsos, ada KPAD juga dan semua turun untuk menanganinya. Kita upayakan tidak terjadi lagi kejadian ini dan suami yang melakukan sudah diproses di Polres Depok," ujarnya. ● **gio**

ATASI MACET PUNCAK

Polres Bogor Batasi Bus dan Truk di Jalur Alternatif Puncak

BOGOR (IM)- Untukantisipasi kemacetan di Puncak Cisarua, Kabupaten Bogor Polres Bogor melakukan pembatasan kendaraan dan bus/truk di jalur alternatif.

Antisipasi ini dilakukan setelah Bupati Bogor, Ade Yasin audiensi dengan Kasatantas Polres Bogor, terkait rencana pembatasan kendaraan bus/truk di jalur alternatif, guna mengatasi permasalahan di jalur alternatif Puncak, yang dilaksanakan di Ruang Kerja Bupati Bogor, Jumat (8/4).

Ade Yasin menyatakan bahwa dirinya menyetujui dan sangat mendukung program yang digagas oleh Kasatantas Polres Bogor untuk mengatasi permasalahan yang kerap terjadi di jalur alternatif Puncak.

Lanjut Ade Yasin bahwa dirinya meminta kepada dinas terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan, Disbudpar, Kecamatan dan Desa wilayah setempat untuk kolaborasi membahas secara teknis guna menindaklanjuti rencana program tersebut.

"Perlu dipersiapkan dengan matang terutama sosialisasi ke masyarakat. Gandeng juga

PHRI karena kawasan Puncak ini adalah kawasan wisata," terang Bupati Bogor.

Selanjutnya, Kasatantas Polres Bogor, AKP Dickly Anggi Pranata menjelaskan bahwa kemacetan di jalur alternatif Puncak salah satunya disebabkan oleh kendaraan bus/truk yang lebar memaksakan masuk ke jalur alternatif Puncak, ruas jalannya tidak sebanding dengan lebarnya kendaraan tersebut.

Untuk itu, katanya perlu dibuatkan lokasi parkir khusus kendaraan bus/truk yang akan masuk ke kawasan wisata yang ada di jalur alternatif Puncak dengan menyediakan angkutan khusus dari lokasi parkir ke lokasi tujuan.

Perlu adanya aturan pembatasan kendaraan bus/truk ke jalur alternatif Puncak, dengan memasang rambu di simpang jalur alternatif. Untuk pembangunan lokasi parkir rencananya ada tujuh lokasi yakni rest area Cilember, Taman Wisata Matahari, rest area Lembah Nyiur, lalu di rest area Anggraeni, rest area Sinbad, kemudian di Hotel Evergreen dan Gunung Mas," imbuhnya. ● **gio**

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

MISA MINGGU PALMA DI YOGYAKARTA

Sejumlah umat Katolik mengikuti Misa Minggu Palma di Gereja Santo Thomas, Seyegan, Sleman, DI Yogyakarta, Minggu (10/4). Misa yang dilaksanakan dengan pembatasan jumlah umat karena Pandemi COVID-19 itu menjadi rangkaian perayaan Paskah serta guna memperingati datangnya Yesus di Yerusalem.

Warga Bojonggede Menunggu Skybridge, Bupati Bogor Sudah Bebaskan Lahan

Harus ada upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bojonggede, salah satunya dengan 'memaksa' mengubah kebiasaan menyebrang di jalan raya menjadi menyebrang menggunakan skybridge.

BOJONGGEDE (IM)- Maryati (48), warga RT 03 RW 01, Desa dan Kecamatan Bojonggede menunggu aksi badan pengelola transportasi jabodetabek (Jabodetabek) dalam pembangunan skybridge yang menghubungkan Terminal dengan Stasiun Bojonggede.

Hal itu agar langkah tersebut bisa 'memaksa' mengubah kebiasaan masyarakat dan mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bojonggede,

terutama di pagi, sore dan malam hari.

"Memang harus ada upaya untuk mengurai kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Bojonggede, salah satunya dengan 'memaksa' mengubah kebiasaan menyebrang di jalan raya menjadi menyebrang menggunakan skybridge," kata Maryati kepada wartawan, Minggu (10/4).

Selain skybridge, Dia menambahkan, diperlukan juga tempat parkir motor yang ter-

integrasi dengan Terminal dan Stasiun Bojonggede, harapan warga biaya parkirnya ramah di kantong.

"Kalau nantinya pemerintah juga membangun parkir motor yang terintegrasi dengan Terminal dan Stasiun Bojonggede, biaya parkirnya murah dan warga sekitar juga bisa dipekerjakan di tempat tersebut," tambahnya.

Maryati mengharapkan agar pemerintah atau Dinas Perhubungan bisa membenahi pelayanan angkutan kota atau umum (angkot), hingga warga tidak banyak menggunakan kendaraan pribadi.

"Pembinaan angkot bisa dimulai dari menata ulang rutenya, hingga bisa menasaryakan banyak pemukiman warga, lalu angkot juga jangan lupa menunggu penumpang di suatu tempat. Hingga warga mau beralih moda transpor-

tasi dari kendaraan pribadi ke angkot," harap Maryati.

Diwawancara terpisah, Bupati Bogor, Ade Yasin mengaku telah melakukan pembatasan tanah untuk tapak skybridge, hal itu ditandai sudah terbitnya surat pengakuan hak (SPH) atas lahan seluas 300 meter tersebut.

"SPH lahan untuk pembangunan tapak sky bridge Bojonggede tersebut sudah ada dan perijinannya sudah komplit, bahkan kami juga sudah menyiapkan surat pinjam pakai lahan tersebut dari Pemkab Bogor untuk BPTJ," kata Bupati Bogor, Ade Yasin.

Informasi yang dihimpun, BPJT Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan segera membangun sky bridge Bojonggede sebagai fasilitas integrasi antara Terminal dengan Stasiun Bojonggede. Adanya sky bridge tersebut

but, nantinya diharapkan akan memudahkan penataan perindahan moda, jadi angkutan penumpang umum dan pribadi cukup berhenti di terminal dan penumpang yang akan berangkat naik KRL dapat mengakses sky bridge menuju stasiun.

Ke depan, pemerintah Kabupaten Bogor berencana menggandeng pihak swasta untuk membangun park and ride pada lokasi yang sama, tidak jauh dari Terminal Bojonggede.

Selain itu, kolaborasi BPJT Kemenhub dengan Pemkab Bogor akan terus berlanjut, salah satunya dengan pembangunan Underpass Bojonggede, sebagai solusi pengurai kemacetan lalu lintas dan meminimalisir angka kecelakaan di pintu kereta api. Pembangunan underpass di dekat Lapangan Siaga tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 2019 lalu. ● **gio**



IDN/ANTARA

WORKSHOP PERFILMAN BALI DIGITAL FEST

Sineas Garin Nugroho (kanan) berbincang dengan aktor Nicholas Saputra (kiri) disela workshop industri perfilman rangkaian kegiatan Bali Digital Fest 2022 di kawasan Sanur, Denpasar, Bali, Minggu (10/4). Kegiatan itu diselenggarakan untuk mengembangkan potensi industri kreatif perfilman di Bali.

KA Pangrango Bogor-Sukabumi Beroperasi Lagi, Penumpang Membludak

BOGOR (IM)- Kereta Api atau KA Pangrango yang melayani masyarakat untuk jurusan Bogor-Sukabumi resmi dioperasikan kembali oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI (Persero). Jadwal pemberangkatan pertama dengan KA nomor K.30-1625 itu diresmikan langsung oleh Direktur Jendral Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Zul Fikri. Hari pertama operasi KA Pangrango, jumlah penumpangnya membludak.

"Hari ini pengoperasian kembali KA Bogor Sukabumi, masih penggunaan dengan jalur lama. Untuk double track-nya, itu kami selesaikan akhir April ini dan Mei sudah operasi full double track dari Stasiun Paledang Bogor hingga Cicurug Sukabumi," kata Zul Fikri memberikan keterangan pers sesuai melepas KA Pangrango operasi kembali di stasiun Paledang, Kota Bogor, Minggu (10/3).

Zul Fikri mengatakan jika pembangunan double track Bogor selesai di bulan April dan sudah bisa dioperasikan pada Mei, maka jumlah perjalanan dan panjang rangkaian KA Pangrango bakal ikut bertambah. Ia menyebut penambahan rangkaian dan jumlah perjalanan ini karena pengguna KA Bogor Sukabumi cukup tinggi.

"Di sini tuh, cukup tinggi angka penggunanya karena war-

ga lebih memilih KA ketimbang (kendaraan) lainnya karena macet. Saat ini, satu lokomotif KA bisa membawa minimal delapan rangkaian kereta. Lalu kereta ini full komersil, tidak ada subsidi Pemerintah. Jadi pelayanan terbaik untuk pengguna kami prioritaskan," kata Zul Fikri.

Dari pantauan, tingkat pengguna KA Pangrango di awal pengoperasiannya cukup tinggi. Bahkan, ada calon penumpang yang sudah memesan tiket untuk mudik nanti. Calon pemudik memesan tiket melalui aplikasi KAI Acces, mayoritas mereka memesan tiket untuk mudik sejak tanggal 27 hingga 30 April ini.

Data dari petugas loket di Stasiun Paledang, KA Pangrango nomor K.30-1625 memiliki total jumlah kursi KA 420. Di pemberangkatan pertama terisi 196 kursi, rincinannya kursi Ekonomi terisi 135 dari 320. Eksekutif terisi 61 dari total 100 kursi.

"Semuanya (pemesan tiket) pake KAI Acces, pem-booking-an mulai dari kemarin, full tadi pagi. Gak nyangka juga bakal sebanyak ini, banyak warga antusias menggunakan layanan KAI. Semoga ini akan terus bergin dan terus berkembang dan jumlah penumpangnya naik," kata Kepala Humas KAI Daops 1, Eva Chairunisa. ● **pra**

Inovasi E-Satpas Polres Bogor, Permudah Masyarakat Buat SIM

BOGOR (IM)- Polres Bogor dalam situasi Pandemi Covid-19 mempermudah pelayanan pembuatan SIM dengan melakukan terobosan baru berupa inovasi E-Satpas Polres Bogor.

Hal ini diungkapkan Kanit Regident Polres Bogor, Iptu Danny Trisepianto A Sutarmas STK, saat ditanya soal inovasi dalam mempermudah pelayanan SIM kepada masyarakat.

Hal ini juga, menurutnya guna menekan angka penyebaran covid-19 dengan mengurangi kerumunan, sehingga Satpas Polres Bogor menerapkan inovasi E-Satpas yang sebelumnya telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan cukup maksimal diterapkan pada masa pandemi covid-19 ini.

Walau kini di tengah pandemi, sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan masyarakat, Satpas Polres Bogor tetap meningkatkan pelayanan public, salah satunya dengan menerapkan inovasi E-Satpas Polres Bogor.

Dengan inovasi E-Satpas ini, masyarakat yang akan membuat SIM dapat memilih dan menentukan sendiri hari, tanggal, maupun waktu untuk mengikuti proses ujian SIM dengan cara mendaftarkan pada situs www.daftarsimbogor.com dengan menyesuaikan gelombang ujian yang telah ditetapkan.

Dengan membagi menjadi 4 gelombang dengan menerapkan batasan protokol kesehatan sehingga jumlah pemohon dapat

dibatasi setiap gelombangnya karena pemohon telah memilih gelombang ujian pada saat mendaftar pada situs daftar online.

Dengan diterapkannya inovasi E-Satpas ini diharapkan dapat mengurangi adanya kerumunan pada proses pembuatan SIM sehingga dirasa cukup efektif dalam upaya pencegahan penyebaran covid-19.

Hanya pada saat pencetakan cukup memakan waktu karena disebabkan mesin cetak hanya dua untuk SIM baru dan terkadang ada kendala teknis terutama saat pemohon SIM cukup banyak sehingga terjadi penumpukan di loket antrean cetak.

Untuk ujian praktik dan teori dilaksanakan dengan membagi



IST

Inovasi E-Satpas Polres Bogor mempermudah pembuatan SIM.

gelombang pemohon SIM yaitu lokasi uji praktik SIM baik R2 maupun R4 yang saat ini masih dalam tahap pembangunan, sehingga untuk ujian praktiknya

dipindahkan sementara ke lapangan baru yang berada di gedung kesenian Pemkab Bogor, di mana lokasinya bersebelahan dengan Polres Bogor. ● **gio**

DPMD Gelar Forum Perangkat Daerah, Masalah Kemiskinan Jadi Sorotan



DPMD

BOGOR (IM)- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor menggelar Forum Perangkat Daerah 2022 pada 22 Februari 2022 lalu dengan tema membangun masa depan Kabupaten Bogor dengan Pancakarsa dalam rangka mewujudkan Kabupaten termaju, nyaman, dan berkeadilan.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldy Fiansyah Rushab, dalam kesempatan tersebut menjelaskan terkait tentang penduduk miskin yang ada di Desa, di mana menurutnya penduduk miskin yang ada bukan tanpa alasan.

Seperti kita ketahui bersama, sejak awal pandemic di awal tahun 2020 hingga 2021, berdasarkan data BPS Kabupaten Bogor, telah terjadi peningkatan angka kemiskinan atau jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor.

Hal itu bisa terlihat dari

table grafik di mana peningkatannya sungguh signifikan," jelasnya saat berbicara di forum tersebut, bahwa data kemiskinan di Kabupaten Bogor, bila dilihat berdasarkan informasi, baik dari media atau pun juga dari BPS, disebutkan bahwa tingkat kemiskinan persentase terbesar masih berada di wilayah pedesaan. Jadi 13,2 persen itu secara nasional masih ada di tingkat pedesaan.

Itu semuanya menjadi satu tantangan tersendiri, yang harus dipecahkan khususnya di Kabupaten Bogor. Maka sudah pada tempatnya DPMD sebagai pemangku kegiatan penyelenggara dan pembinaan di desa mempunyai fokus yang lebih dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan yang berada di wilayah pedesaan.

"Ini adalah salah satu gambaran indeks desa membangun sebagai salah satu indikator capaian kegiatan teman-teman di desa, dari 39 Kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor selain Cibinong, indeks kecamatan kalau boleh kita presentasikan ada 3 kecamatan dengan IDM dengan status mandiri, dengan angka 0,83 poin, kemudian sisanya ada kecamatan dengan kategori maju dan berkembang," terangnya.

Kemudian ia menyebutkan, 10 Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain yakni: Kecamatan Kemang Desa Pondok Udik, kemudian Desa Bojong Gede di Kecamatan Bojong Gede, Desa Dayeuh di Kecamatan Cileungsi, Desa Gandoang di Kecamatan Cileungsi, Bojong Kulur di Kecamatan Gunung Putri, Desa Ciangsana di Kecamatan Gunung Putri, kemudian Desa



Limununggal di Kecamatan Cileungsi, Desa Sukahati di Kecamatan Citeureup, Desa Mekarsari di Kecamatan Cileungsi dan Desa Pasir Mukti di Kecamatan Citeureup.

Pihaknya juga menyampaikan, berdasarkan data perhitungan Kementerian Desa ada 10 desa dengan IDM terendah antara lain Kecamatan Sukajaya, Cibungbulang, Jasinga, Sukaraja, Kemang, Nanggung, Cibungbulang dan Jasinga ungkapnya.

Renaldy Fiansyah Rushab juga menjelaskan tentang adanya penduduk miskin di Desa, yang menurutnya bukan tanpa alasan. Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Kabupaten Bogor, Nuradi yang mewakili Bupati Bogor, Ade Yasin menekankan bahwa, agar masyarakat bisa terwakili melalui DPRD,

31 target daerah harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun 2023 mendatang. Untuk itu seluruh perangkat daerah dalam mencapai target kerja terutama

dalam hal lalu pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan pengangguran dan ketimpangan yang menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah, saya harapkan rumusan kerja ini dapat menghasilkan tujuan dan sasaran pembangunan pancakarsa dan terwujudnya misi Kabupaten Bogor termaju di Indonesia.

Hal yang sama yang disampaikan oleh Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bogor, Supratan. Program pancakarsa merupakan program unggulan di Kabupaten Bogor dan samsade dan sekolah desa, saya lihat bahwa di anggaran di paguliatif untuk 2023 akan ada 250 kepala desa dan operator. Hari ini, atau tahun ini tahun 2022 di samsade ada 415 dan mudah-mudahan naik menjadi 416 M.

Jadi ini bukan rapat kerja lagi, ini hasil rapat kerja kami dengan DPMD di tahun 2022. Sehingga nanti dalam rapat kerja, apa yang menjadi arahan dari Bupati itu

tinggal dilaksanakan, jangan sampai setelah kami research ternyata banyak kegiatan yang tidak tercover. Lebih lanjut Supratan menjelaskan, itulah harapan Bupati, apabila yang tidak tercover oleh Musrembang masuk pada pokok pikiran atau aspirasi dewan, karena banyak di desa-desa apalagi sekarang musim penghujan banyak bencana, jadi pasti banyak laporan-laporan tentang ingin adanya pembangunan yang harus dilaksanakan pada anggaran 2023 bahkan ada yang ingin di tahun 2022. Itulah harapan kami yakni kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif untuk melaksanakan masing masing SKPD harus juga memprioritaskan yang disampaikan oleh Bupati tentang 31 indikator. Apakah ada yang menjadi kewajiban di dinas atau perangkat daerah supaya sinkron apa yang harus selesai di tahun 2023 tegasnya. ● **jai/gio**